

ETNISITAS, HUBUNGAN SOSIAL DAN KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT

John Haba¹

Abstract

Indonesia has more than 300 ethnic groups living scattered in around 17.000 islands. Having said that, brilliantly Indonesian founding fathers such Soekarno, Hatta and other prominent leaders fought and struggled to lay down a very strong foundation, to bring all ethnic groups and its complexities into the one nation state. Since the beginning, the challenge is to bring all the ethnic groups, races, religious adherents together into one framework of thinking, that we are one nation being constructed from various social, ethnic and religious background.

Various regional unrest during Soekarno's era up to the present, should be discerned as a consequence of imbalance development policy and political 'treatment' especially over people who reside in outer islands. Although improvement and reorientation of development policies and programs have brought much changes for people who live far from Jakarta. But, the arrival of decentralization period which had started in January 1999, where the transferred of power from the center to the region resumed, some ethnic violents and clashes occurred. One among several ethnic tragedy happened in Indonesia, was the bloody Sangau Ledo and Sambas conflict that severely forced the Madura peoples to leave the West Kalimantan Province, a site they had resided for many years. After the uncertainty in the social and ethnic nexus among Madura, Dayak and Melayu peoples, as a result of the conflict, today the situation is gradually improving, and social interaction in the conflict sites is much developing to be better compared with the time when the clashes erupted.

Keywords: *Ethnicity, Conflict, West Kalimantan.*

¹Peneliti Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta. Email: darahkubiru@yahoo.com, habanet52@hotmail.com

Pengantar

Indonesia dengan 300 kelompok etnis² merupakan sebuah kekayaan budaya, sejarah dan kearifan lokal yang patut diapresiasi. Varian-varian kelompok etnis ini dengan segala potensi yang dimilikinya menjadi pertimbangan serius para pendiri bangsa, seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan kawan-kawan. Amalgamasi ratusan kelompok etnis dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki dimensi ganda. Pertama, menguatkan sebuah bangsa besar dengan kekayaan budaya, nilai, norma, sejarah dan kearifannya. Kedua, bertentangan dengan sisi positif tentang bermanfaatnya penggabungan banyak suku bangsa ke dalam sebuah negara bangsa (*nation state*), tetapi bersamaan dengan itu, bagaikan bara dalam sekam, potensi dan ancaman benturan antara etnis juga terbuka dalam masyarakat Indonesia yang multi etnik ini.

Asumsi bahwa sebuah negara yang majemuk membawa potensi menjadi bangsa yang kuat sekaligus memperhatikan ancaman disintegrasi dialami juga oleh bangsa Indonesia. Dasar negara Pancasila, dan salah satu silanya tentang “Persatuan” Indonesia”, yang bertujuan menyatukan keberagaman kelompok etnis tampaknya selalu berada di bawah bayang-bayang keretakan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Indikasi akan adanya ancaman itu antara lain terbukti dari berbagai konflik etnis di Indonesia, dan salah satu konflik besar yang berdampak pada jatuhnya banyak korban jiwa dan material terjadi di Sambas, Sanggau Ledo di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 1999.

Artikel ini berkaitan dengan isu-isu berikut: konsep ringkas tentang etnisitas/etnis, bentuk-bentuk hubungan etnis, konflik, dan pelajaran berharga yang dapat diperoleh dari konflik di Kalimantan Barat secara khusus dan di Indonesia umumnya yang memiliki keberagaman etnis.

²Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelompok etnis di Indonesia hingga tahun 2010 adalah 1.200. Sebelum BPS memasukkan “variabel etnis” ke dalam dokumennya, jumlah kelompok etnis di Indonesia berkisar antara 300-500. Pertambahan jumlah kelompok etnis ini mungkin disebabkan oleh kriteria ‘lain’, yang dipergunakan dalam mengidentifikasi kelompok etnis di Indonesia.

Pendahuluan

Etnisitas³ adalah isu yang terus menerus dinegasikan dan dinegosiasikan oleh askripsi eskternal, dan pengidentifikasian diri secara internal dalam setiap kelompok masyarakat. Perbedaan mengenai konsep etnisitas, tampak dari kontruksi epistemologi pokok Frederik Barth, dalam mendefinisikan dan merelatifkan konsep mengenai masyarakat, yang diyakini sebagai sebuah fenomena alamiah dari kebudayaan manusia (Haba, 2010). Filosof Jurgen Habermas (1981) mengakui bahwa, masalah legitimasi dari negara moderen di mana di dalamnya terdapat berbagai kelompok etnis, harus didasarkan pada konsep hak-hak politik dari setiap warga negara yang otonom. Artinya, negara harus mengakui secara khusus identitas etnis, nasional dan ras, untuk mendorong serta memperjuangkan dengan serius keseluruhan hak-hak umum dan politik untuk semua warga negara. Pandangan yang mendukung otonomi warga negara⁴ disuarakan juga oleh Will Kymlicka (2003), yang menekankan bahwa wacana mengenai otonomi individu berakar pada konstruksi kebudayaan. Oleh sebab itu, sebuah negara yang dibangun dari berbagai kelompok etnis seperti Indonesia, haruslah mengakui identitas setiap kelompok etnis dengan berbagai perbedaan, memelihara dan menjamin kebutuhan seluruh kelompok etnis yang hidup berdampingan.⁵

Benedict Anderson (1983) yakin bahwa apa yang dinamakan dengan identitas nasional adalah sesuatu yang dikreasikan melalui jalur komunikasi. Untuk istilah bangsa atau “*nation*”, Anderson⁶ menyebutkannya sebagai suatu identitas yang “terbayangkan” (*imagined*). Identitas nasional merupakan konstruksi yang dirajut dan diikatkan dengan atribut dan ritual bersama secara kategoris dan administratif.

³Etnisitas lazimnya didefinisikan sebagai suatu bagian dari identitas individu atau pribadi (*personal's identity*) yang dihubungkan dengan atribut ras, sejarah, agama, simbol sosial, bahasa dan wilayah.

⁴Otonomi individu bukan elemen dari perjuangan warga negara untuk *self-determination*, tetapi merupakan hak-hak dasar setiap manusia di manapun.

⁵Gangguan politik yang berakhir dengan lepasnya eks. Provinsi Timor Timur pada bulan Januari 1999 pada masa pemerintahan mantan Presiden B.J Habibie, menjadi bagian dari “politik akomodasi” pemerintahan Indonesia saat itu terhadap tekanan internasional, tidak termasuk dalam kategori Kymlicka.

⁶Benedict Anderson percaya bahwa nasionalisme Asia Pasifik tidak spesifik, sebab nasionalisme Asia umumnya merupakan respons dari banyak negara jajahan di Asia dan Afrika terhadap imperialisme global, terhadap perkembangan industri kapitalisme.

Kesadaran nasional adalah kesadaran dari warga kelompok etnis di Indonesia yang beragam⁷ menyatu dengan muncul dan berperannya percetakan. Percetakan menyebarkan konsep melalui bahasa tersebarlah juga bahasa, sebagai prakondisi timbulnya kesadaran akan identitas bersama. Dari beberapa konsep atau pemikiran mengenai isu etnisitas di atas terdapat empat isu utama di dalamnya. *Pertama*, etnisitas bukanlah sebuah konsep yang statis tetapi sebuah gagasan yang cair (*fluidity*), yang terus didefinisi dan ditemukan, dinegosiasikan kembali dalam konteks politik dan ekonomi lokal dan global serta masyarakat yang berubah dengan cepat. *Kedua*, warga negara memiliki hak-hak politik, terutama dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama dan ras. *Ketiga*, adanya pengakuan akan atribut-atribut agama⁸ dan etnis melalui manajemen budaya yang tidak diskriminatif. *Keempat*, konsep mengenai etnis/etnisitas adalah hasil konstruksi, sebagai kesadaran diri akan eksistensi individu dan kelompok dibandingkan dengan individu dan kelompok lain, baik mereka yang berdampingan atau pun individu dan kelompok yang tidak pernah dikenal dan berada dalam jarak geografis (*imagined community*).

Salah satu faktor penting untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan etnis adalah “keberadaan ruang publik di mana perbedaan antaretnis mendapatkan pengikisan dalam proses pembauran. Dalam satu ruang publik tertentu, berbagai etnis belajar berkomunikasi dengan cara tertentu agar lebih dapat diterima. Pada sisi lain, setiap etnis pun mesti belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kelompok lain” (Abdullah, 2007:87). Di samping hubungan antaretnis, dominasi agama tertentu pun di wilayah tertentu ‘mematikan’ keberagaman hak beribadah dan berekspresi setiap warga negara. Lebih lanjut, Frederik Barth (1969:14) ketika membahas tentang batas

⁷Keberagaman etnisitas Indonesia secara umum dapat dilakukan dengan membedakan antara etnisitas budaya (*ethnicity culture*) dan etnisitas politik (*political ethnicity*). Etnisitas budaya dihubungkan dengan keyakinan akan adanya kesamaan agama, bahasa, nilai dan perilaku. Etnisitas politik berkaitan dengan kesadaran politik, dan atau mobilisasi seluruh kelompok etnis secara nyata, atau yang terbayangkan menurut kelompok etnis tertentu (al. Dayak, Madura, Jawa, NTT, dlsb).

⁸Lokasi di mana satu agama didominasi oleh agama tertentu, maka atribut-atribut agama seperti salib, gereja, masjid, suara azan, menjadi momok untuk penduduk berbeda agama. Realitas ini menjadi bukti bahwa jaminan untuk hak-hak dasar warga negara seperti hak beribadah masih sebatas wacana.

etnis/etnisitas atau “ethnic boundary”, mengatakan “*It is important to recognize that although ethnic categories take cultural differences into account, we can assume no simple one-to-one relationship between ethnic units and cultural similarities and differences. The fetures that are taken into account are not the sum of “objective” differences, but only those which the actors themselves regards as significant. Not only do ecological variations mark and exaggerate differences; some cultural features are used by the actors as signals and emblems of differences, others are ignored, and in some relationships radical differences are played down and denied*”. Barth, ketika membahasakan tentang isu etnisitas cenderung bersikap ‘terbuka’, dan penentuan batas-batas etnis tergantung pada para aktor itu sendiri (Tirtosudarmo, 2010: 212).

Konsep Hubungan-Hubungan Etnis

Hubungan antara kelompok etnis dalam masyarakat secara umum, adalah hubungan sosial yang dibangun oleh warga masyarakat yang hidup bersama dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Hubungan-hubungan itu dapat bersifat informata atau spontan, ataupun melalui jalur formal atau organisasi. Salah satu model hubungan antara individu dari kelompok etnis adalah model konvergensi. Model konvergensi adalah hubungan individual dalam setiap masyarakat, mempunyai kecenderungan relasional yang dicirikan oleh apa yang dinamakan *homophily*⁹. Atau, setiap warga masyarakat memiliki tendensi untuk memilih individu atau kelompok yang diyakini memiliki kesamaan-kesamaan, seperti etnis, agama, ras, hobi, pekerjaan, ketrampilan, lokasi/daerah dan kelompok (Rogers, 1983). Jaringan sosial melalui hubungan-hubungan personal dan komunal ditandai juga oleh keterbatasan, yang tidak seluruhnya dapat memenuhi keinginan para warga masyarakat yang berhubungan itu, seperti hubungan pekerjaan, faktor agama, pendidikan, pendapatan, usia, dan kepentingan (Boissevain-Clyde, 1972).

Pola hubungan sosial lainnya adalah *heterophily* yaitu pola relasi antarindividu yang berbeda kepentingan, umur, agama, pekerjaan,

⁹Kendatipun terdapat sejumlah keterbatasan pada tataran praksis, kesamaan-kesamaan lokasi, agama, etnis, hobi, pekerjaan dan lain sebagainya tidak menjamin terbangunnya hubungan sosial antara warga masyarakat. Pada sisi ekstrem, gesekan dalam masyarakat justru sering terjadi di antara warga yang memiliki kesamaan-kesamaan agama, etnis, dan pekerjaan.

pendidikan dan faktor-faktor berbeda lainnya. Interaksi dari relasi-relasi yang dibangun itu baik formal maupun informal, berjalan sesuai kebutuhan para warga dalam sebuah atau lebih komunitas. Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan bahwa, “Jaringan dan kontak sosial yang telah dibangun itu akan diberlakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan realitas hubungan sosial selama ini, pola *homophily* mempunyai ruang gerak lebih besar dari pola *heterophily*” (Haba, 2005:84). Dua pola hubungan sosial ini juga ditemukan dan dialami oleh warga berbagai kelompok etnis, yang sudah hidup bersama dalam jangka waktu lama di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Hubungan Antaretnis dan Konflik

“*Social conflicts are all around us. They are inherited in human relations*” (Kriesberg, 1982:1). Ucapan Kriesberg ini hendak menegaskan bahwa konflik yang mengambil bentuk apapun dan di antara kelompok manapun tidak terjadi di ruang hampa dan bersifat tunggal, tetapi konflik terjadi¹⁰ karena ada relasi sosial di antara warga berbagai kelompok. Pada sisi lain, tidak seluruh relasi sosial selalu berdampak dengan konflik, sebab banyak bukti dalam realitas sosial masyarakat Indonesia; bahwa di antara warga berbeda kelompok etnis yang hidup berdampingan dirasakan adanya keharmonisan dan pengertian, kendatipun warga berbeda etnis memiliki perbedaan ideologi dan keyakinan agama. Konflik yang terjadi di mana pun termasuk di Kalimantan Barat selalu memiliki kesamaan dan perbedaan latar belakangnya. Park dan Burgess (Kriesberg, 1982:4) mengatakan “*Conflict is always conscious. Indeed it evokes the deepest emotions and strongest passions and enlists the greatest concentration of attention and of effort. Both competition and conflict are forms of struggle. Competition, however, is continuous and impersonal.*

¹⁰Berbagai faktor penyebab konflik seperti perbedaan kepentingan di antara individu, kelompok, organisasi, perbedaan ideologi, keyakinan, perebutan sumber daya alam dan pengaruh atau kekuasaan atas wilayah tertentu yang tidak dapat diatasi melalui kesepakatan, dan sebagainya. Konflik tidak selalu berdampak negatif yang memecah belah warga masyarakat, tetapi konflik juga dapat menguatkan solidaritas warga dalam sebuah kelompok (*ingroup*). Konflik berasal dari kata Latin *confligere* yang artinya berbenturan atau saling memukul. Ju Lan (2003) mengklasifikasi konflik atas tiga tipe yakni: konflik separatis, konflik komunal dan konflik memperebutkan sumber daya alam. Konflik di Kalimantan Barat lebih tepat dikategorikan dalam konflik komunal dan konflik memperebutkan sumber daya alam.

Conflict is intermittent and personal'. Kebenaran pandangan Park dan Burgess dalam mendefinisikan konflik adalah bahwa pelaku konflik menyadari apa yang dilakukan, dan konflik menyita banyak emosi dan perjuangan. Kompetisi para pihak terhadap isu, kepentingan dan hak merupakan unsur-unsur penting yang ikut berkontribusi terhadap konflik, baik konflik antaretnis, konflik bernuansa agama, konflik atas sumber daya alam, dan lain sebagainya. Atau, konflik apapun lazimnya terjadi sebab persaingan akibat ketidaksesuaian kepentingan (*incompatibility of interest*) atas sejumlah isu yang tidak dapat dihindari, baik konflik yang memakan waktu lama maupun yang bersifat temporer (*intermittent*), dan kondisi seperti ini juga dapat ditelusuri dari akar konflik antaretnis di Kalimantan Barat.

Dari sisi administratif, Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi keempat terluas di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur), dan lazim disebut "Provinsi Seribu Sungai", ini memiliki 13 kabupaten dan 1 Kota Administratif (Pontianak). Provinsi tersebut memiliki luas wilayah 146.807 km² atau 7.53% luas Indonesia, dihuni oleh mayoritas suku bangsa Dayak, Melayu, Jawa, Cina, Banjar, Bugis dan pendatang lainnya. Ditinjau dari sisi pekerjaan, kelompok suku Melayu, Jawa, Banjar menduduki posisi sebagai PNS/TNI/POLRI, kelompok etnis Cina menguasai sektor perdagangan begitu juga dengan kelompok etnis Bugis, suku Madura bergerak di sektor pertanian dan perkebunan tradisional bersama dengan pendatang dari Madura, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Secara umum, terdapat empat kelompok etnis besar di Kalimantan Barat, masing-masing Melayu, Dayak, Cina dan Madura (Cahyono-Adam, dkk, 2006: 27-78).¹¹ Kelompok etnis Melayu berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia termasuk penduduk lokal atau Dayak, yang setelah memeluk agama Islam dikategorikan sebagai orang Melayu. Rujukan mengidentifikasi kelompok Melayu di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: penduduk yang sedari awal telah memeluk agama Islam, menjadi atau disebut Melayu sebab perkawinan, serta terdapat suku-suku lain yang bukan suku Dayak yang beragama Islam yang juga menyebutkan dirinya sebagai orang Melayu. Kelompok etnis kedua

¹¹Salah satu kelompok etnis utama di Kalimantan Barat adalah suku Jawa, yang lebih besar jumlahnya dari kelompok etnis Cina,

adalah Dayak. Umumnya, orang Dayak¹² bermukim di hulu-hulu sungai dengan mata pencarian utama bercocok tanam dengan cara meramu dan berburu. Pola pemukiman penduduk berada di sepanjang aliran sungai, dan migrasi keluar berjalan secara evolusioner¹³. Setelah pemerintah menetapkan kebijakan Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT), masyarakat dipaksa bermukim dekat sentra-sentra pemerintahan. Suku Dayak terbagi dalam berbagai sub-kelompok etnis, dan kelompok ini dapat dibedakan dari dialek, upacara adat, pola hidup dan norma-norma lokal.

Di samping kelompok etnis Melayu dan Dayak, kelompok dominan lainnya adalah kelompok etnis Cina, yang didatangkan oleh Sultan Landak dan Sultan Sambas dari wilayah Fukian (Cina) pada abad ke 18. Etnis Cina didatangkan untuk dipekerjakan di penambangan emas di daerah Mandor, Monterado, Budok dan Singkawang. Etnik Cina terdiri dari empat kelompok besar yang datang ketika itu adalah suku Hokkien, Teo Chiu, Khek dan Kanton.¹⁴ Kelompok etnis Madura bermigrasi ke Kalimantan Barat sejak sekitar abad ke 13 – abad ke 20. Karena keterbatasan pendidikan, maka kelompok etnis Madura lebih banyak bekerja di sektor pertanian dan pekerjaan informal lainnya. Kelompok suku ini memiliki hubungan sosial yang kuat, dan saling membantu sesamanya yang belum memperoleh pekerjaan dan tempat tinggal. Kondisi alam Pulau Madura yang kering dan gersang ikut membentuk karakter mereka yang keras, suka hidup bersatu dalam kelompok (eksklusif) dan jarang beradaptasi dengan kelompok lainnya. Lambang

¹²Selain istilah “Dayak” dikenal juga istilah “Dyak” yang berhubungan dengan istilah Dayak itu sendiri. Istilah Dayak diberikan oleh bangsa Inggris untuk orang Dayak di Kalimantan Utara. Terdapat keberatan di antara warga Dayak sendiri untuk mempergunakan istilah “Dayak”. Kata “Dayak” dan “Daya” dalam bahasa Ngaju berarti kekuatan, atau dalam bahasa Sangen, Dayak artinya “Bakena” artinya gagah untuk laki-laki atau cantik bagi perempuan (Maunati, 2004:59).

¹³Tendensi migrasi ini terus meningkat seiring dengan kemajuan transportasi, komunikasi, informasi, pembangunan, pendidikan dan kegiatan sosial ekonomi lainnya yang berangsur masuk hingga ke pelosok daerah terpencil Kalimantan Barat.

¹⁴Kelompok keturunan Cina dapat disebut sebagai “Cina Totok” atau generasi asli imigran Cina di Kalimantan Barat, dan “Cina Peranakan” yaitu kelompok imigran Cina yang kawin mawin dengan penduduk lokal dan “Cina Phan Tong” adalah identitas warga Cina yang kawin dengan suku Dayak (Cahyono-Adam, dkk, 2006: 43).

'kejantanan' dengan membawa "clurit" disertai budaya "carok", di mana warga Madura siap membalas dendam kepada siapapun yang dianggap mengancam hidup mereka, ikut berdampak pada terjadinya konflik (Cahyono-Adam dkk, 2006: 44-45).

Dari deskripsi di atas menunjukkan bagaimana bidang-bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat telah terpolakan berdasar kelompok etnis tertentu. Sebagai contoh, etnis Melayu menguasai sektor pemerintahan dan kelompok suku Cina menguasai jalur perdagangan besar, menengah dan kecil. Selanjutnya penduduk lokal (Dayak) berangsur-angsur tersisihkan dari panggung kehidupan sosial masyarakat di daerah ini, dan lebih banyak bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan sektor informal serta di sektor pemerintahan tetapi dalam jumlah terbatas. Fenomena dari 'pembagian' wilayah kerja mungkin tidak termasuk dalam faktor dominan pemicu konflik, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai faktor kecemburuan sosial, yang secara tidak langsung ikut memicu konflik etnis di Provinsi Kalimantan Barat.

Orang Dayak merasa dimarginalisasikan oleh kebijakan pemerintah sejak pemerintahan Orde Baru, yang memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) secara besar-besaran kepada para pengusaha. Adanya otonomi daerah mendorong kelompok etnis Dayak di Provinsi Kalimantan Barat, untuk berupaya merefleksikan dirinya di tengah perubahan cepat sosial, ekonomi, lingkungan dan sumber daya alam. Masuknya para pekerja di berbagai sektor seperti HPH, transmigrasi, perkebunan kelapa sawit mengakibatkan ketimpangan penduduk, dan ketergangguan geografis. Mendukung keresahan sosial masyarakat Dayak ini dalam hal pengeksploitasian hutan, Djuweng (1999:187) meyakini bahwa "Selain HPH, pembangunan yang meminggirkan orang Dayak di Kalimantan adalah kegiatan pertambangan. Di desa Kerangas, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, para penambang lokal ditangkap Mabes Polri (menurut keterangan masyarakat setempat) dengan menggunakan helikopter. Kawasan itu semula merupakan lokasi Wilayah Tambang Rakyat (WTR), tiba-tiba menjadi konsesi pertambangan PT Kapuas Aluvial Jaya. Sengketa ini berakhir dengan penangkapan dan pemenjaraan para penambang rakyat".

Salah satu aspek penting yang terus mengganggu eksistensi, status dan hak-hak masyarakat lokal antara lain suku Dayak¹⁵ di Kalimantan adalah kebijakan pemerintah tentang “masyarakat (hukum) adat” yang tidak jelas keberpihakannya. Kendatipun telah lama bermukim di wilayah administratif tertentu sebelum Indonesia merdeka, tetapi negara yang diwakili oleh pemerintah telah ikut merampas hak-hak hidup warganya. Pembangkangan negara terhadap keberadaan kelompok masyarakat melalui pengakuan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya dapat dirujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI Pasal 18 yang mengatur pembagian wilayah Republik Indonesia sebagai berikut “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. Sikap negara yang tidak menghiraukan hak-hak masyarakat adat terwujud, antara lain dengan dikeluarkannya kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH),¹⁶ yang mengeksploitasi jutaan hektar hutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Proses marginalisasi orang Dayak dilakukan juga oleh pemerintah. “Pemerintah telah mengubah hutan-hutan dan tanah-tanah adat menjadi daerah transmigrasi, perkebunan, dan penebangan kayu, dengan janji bahwa proyek itu akan menguntungkan mereka. Meskipun begitu, banyak di antara proyek-proyek itu justru semakin memperburuk standar hidup mereka” (Tanasaldy, 2007:478).

Paradoksi mengenai eksistensi, status, dan hak kepemilikan adat tidak selalu berpadanan dengan tatanan hukum positif atau hukum nasional, sehingga potensi konflik yang berkaitan dengan tanah, hutan, hak-hak tradisional dan wilayah terus menjadi keprihatinan masyarakat adat di Indonesia termasuk masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Salah

¹⁵“Dayak” adalah sebutan kolektif terhadap sekitar 405 kelompok etnolinguistik yang mendiami Pulau Borneo. Mereka dinamai Iban, Kayan, Kenyah, Kenayatan, Maanyan, Ngaju, Uut Danum, Bidayuh, Simpang, Pompaking, dan lain lain. Sebenarnya penamaan sub-suku Dayak juga dapat didasarkan pada letak geografis kawasan adat mereka” (Djuweng, 1999:172).

¹⁶Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok “Kehutanan”, salah satu produk undang-undang masa Orde Baru, selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang “Pokok-Pokok Pertambangan” yang berdampak pada kehancuran hutan dan lingkungan, serta proses memarjinalisasikan masyarakat adat seperti suku Dayak di Kalimantan.

satu ketidaksielarasan konseptual antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak adalah mengenai kontens kesejahteraan masyarakat. Untuk masyarakat Dayak, “sejahtera adalah sungai memiliki ikan, hutan ada binatangnya, berladang dapat padi, teluk bernaga, batu tidak berubah, gunung tidak berpindah, pisang berbuah, tebu beranak pinak” (Djuweng, 1999:194). Pengertian kesejahteraan dalam pemahaman masyarakat adat Dayak adalah memprioritaskan keseimbangan atau keharmonisan manusia dengan alam, pemanfaatan sumber daya alam secukupnya, menjaga lingkungan dengan tidak mencemari sungai dan menebang pohon sesuai kebutuhan. Konsep yang dianggap tradisional dan tidak progresif menurut pemerintah atau penentu kebijakan di Indonesia ini, tampak dari kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang merusak lingkungan akibat eksploitasi hutan dan tambang secara eksesif. Wilayah hutan dan tambang di Kalimantan termasuk Kalimantan Barat diklaim berada dalam kawasan hutan adat masyarakat Dayak, yang masih disengketakan dengan pihak pemerintah dan pemilik modal.

Faktor lapangan pekerjaan, rusaknya hutan dan menurunnya subsistensi yang berasal dari hutan dan sungai, marjinalisasi hak-hak kelompok etnis Dayak, intervensi modal global dan nasional ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat hingga ke pelosok desa, ikut merubah struktur dan adat istiadat masyarakat Dayak. Sebagai ilustrasi, salah satu kebijakan pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial Republik Indonesia yang menggerus identitas masyarakat Dayak adalah Perombakan Rumah Panjang” (Lamin atau Ramin). Berdasarkan pandangan pemerintah (Depsos), rumah panjang bukanlah rumah yang sehat, mencegah terjadi perbuatan asusila, jauh dari sentra pemerintahan dan kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta anti kemoderenan.¹⁷ “Kebijakan pemindahan penduduk dari satu desa ke desa lain dalam sebuah kabupaten atau provinsi yang sama, tidak seluruhnya didasarkan pada sebuah perencanaan pemukiman fisik; dengan

¹⁷Rumah Panjang (dinamakan juga “Rumah Betang”) bagi orang Dayak memiliki fungsi berbeda dari konsepsi Departemen Sosial Republik Indonesia, sebab rumah panjang adalah kesatuan sosial dan ekonomi paraarganya, aspek keamanan, dekat dengan sumber transportasi (kali/sungai), sekaligus identitas komunal yang tidak ditemukan di daerah lain/orang Dayak. Konseptualisasi ini tidak dipahami atau tidak mau dipahami oleh pihak pemerintah (Kemsos) yang menganggap diri paling mengetahui mengenai kebutuhan masyarakat perdesaan Indonesia.

memperhatikan kesatuan sosial dan kohesi sosial warga sebuah komunitas yang telah terkonstruksi selama ini” (Haba, 2005: 85).

Dampak Konflik dan Hubungan Antaretnis

Hubungan antaretnis pra konflik tahun 1999 dirasakan kondusif, di mana interaksi antara warga Melayu, Dayak, Madura, Cina, Jawa dan kelompok etnis lainnya di berbagai sektor kehidupan berjalan dengan baik. Kendatipun demikian, realitas sosial yang kelihatan setiap hari itu sesungguhnya bagaikan bara dalam sekam, sebab telah terjadi perbedaan pemaknaan terhadap siapa penduduk pribumi atau asli dan siapa pendatang. Lebih lanjut, konstruksi etnisitas yang menekankan perbedaan itu dipicu dengan penguasaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang tidak menguntungkan kelompok Dayak, yang mengklaem bahwa mereka adalah penduduk asli yang terus terdesak oleh kehadiran dan peran penduduk pendatang. Sikap merasa berbeda, terdepak dari sumber daya alam dan lingkungan sosial di kalangan suku Dayak mencapai puncaknya, tatkala terjadi aksi premanisme (pencurian) oleh seorang pemuda Madura di Desa Sari Makmur tanggal 17 Januari 1999, dan penusukan kernet angkot Melayu oleh seorang Madura. Dua peristiwa itu mendorong pembalasan dendam dan kerusuhan massa di Kabupaten Sambas dan meluas hingga ke Singkawang. Dampak dari kerusuhan ini menurut data Kepolisian Resort Sambas sampai dengan bulan Maret 2000 adalah 12.185 rumah dibakar, 315 rumah dirusak, 40 luka ringan, 71 luka berat, 177 tewas dan 21.626 warga Madura meninggalkan tempat tinggal mereka (<http://sosbud.kompasiana.com/2012/04/25/konflik-antar-kelompo...>). Konflik antara warga Melayu dan Madura semakin meluas dan akhirnya melibatkan warga Dayak, sehingga skala konflik menjadi meluas dan sulit diatasi.

Apabila ditelaah dari sisi geografis, warga Melayu, Madura, Dayak dan kelompok etnis lainnya tinggal dalam sebuah wilayah yang sama, yakni Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun demikian, afiliasi etnis dan geografis tidak sepenuhnya menjamin stabilitas sosial dan relasi sosial yang setara dari para warga berbeda etnis. Perbedaan yang ikut memicu konflik dapat ditelusuri juga pada aspek asal usul dan keturunan, yang sering dipakai untuk memperlebar jarak sosial antarkelompok, sehingga kasus sekecil apapun dapat dikonstruksikan untuk menyulut konflik. Kasus premanisme atau pencurian dan penusukan oleh pemuda Madura sehingga mengakibatkan konflik etnis di Kalimantan Barat itu, hanyalah puncak dari kegelisahan dan perasaan

menolak kehadiran kelompok lain, seperti warga Madura, yang dalam pandangan kelompok Melayu dan Dayak menjadi akar dari berbagai gangguan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Atau dalam perspektif lokal Kabupaten Sambas khususnya dan Provinsi Kalimantan Barat umumnya, terdapat dua unsur utama yang menjadi faktor pemicu konflik yaitu wilayah atau tanah dan penduduk. Mengidentifikasi diri dengan wilayah atau tanah sebagai bagian dari identitas yang utuh bagi kelompok Dayak dan Melayu, ikut menghidupkan patriotisme etnis untuk melawan berbagai bentuk halangan dari luar komunitas mereka, kendatipun bentuk-bentuk hambatan itu tidak harus dikembangkan menjadi dasar konflik antara kelompok etnis berbeda. Faktor penduduk yang menjunjung tinggi paternalisme dan identitas kelompok yang kuat, akan mendorong terbangunnya sekat-sekat etnis yang cenderung menarik garis perbedaan dengan mempergunakan rujukan agama, wilayah, sejarah, bahasa, simbol dan sebagainya. Apabila unsur wilayah dan penduduk diprioritaskan tanpa membuka ruang sosial untuk kelompok berbeda agama dan etnis, maka potensi kecurigaan dan konflik akan terjadi setiap saat sebagaimana yang dialami di Kalimantan Barat.

Setiap konflik meninggalkan trauma bagi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dengan korban jiwa dan material. Oleh karena itu, pemulihan pasca konflik membutuhkan usaha serius yang mencakup bidang material, mental dan kejiwaan. Upaya-upaya yang melibatkan para pihak (*stakeholders*) ini, tidak seluruhnya dapat menghilangkan trauma akibat kehilangan jiwa anggota keluarga dan harta benda. Etnis Madura setelah pengalaman suram, konflik horizontal, berupaya untuk bangkit kembali. Warga etnis Madura yang mengungsi di Pontianak, dan daerah sekitar Kalimantan Barat yang dianggap aman, serta di kota asal di Madura dan Jawa Timur mencari kemungkinan untuk kembali ke pemukiman mereka sebelum konflik. Kendatipun perjuangan untuk kembali ke pemukiman tidaklah mudah, tetapi perjuangan warga Madura itu perlu dipahami dalam perspektif berikut ini.

Tanpa didorong atau dipaksakan oleh pemerintah atau agensi lain, para korban konflik Sambas dan Sanggauledo mulai membangun kembali kehidupan mereka. Mereka kembali ke lokasi di mana mereka telah menginvestasi hidup dan sumber daya mereka. Perjuangan untuk kembali ke pemukiman yang memiliki risiko. Para korban konflik hendak membangun kembali hubungan sosial dengan penduduk dan lingkungan yang telah mereka tinggalkan dalam periode waktu tertentu. Lebih lanjut, langkah-langkah merehabilitasi hubungan sosial dengan kelompok etnis

Dayak dan masyarakat sekitar pemukiman mereka, berdasar pada kesadaran di kalangan para korban yaitu warga Madura tentang yang penting akan perasaan memiliki Indonesia (*sense of ownership*). Kesadaran memiliki ini mendorong dan memotivasi mereka tidak sepenuhnya disadari oleh para korban konflik, namun langkah-langkah ini adalah upaya untuk mempertahankan pemahaman mengenai Indonesia sebagai sebuah negara atau rumah yang menampung semua warga negara dari kelompok etnis manapun yang diupayakan, oleh kelompok-kelompok yang bertikai dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kualitas kesadaran bernegara, berbangsa dan bermasyarakat ini tampaknya sementara mengalami krisis makna dalam era otonomi daerah sekarang ini dalam masyarakat Indonesia.

Kesadaran etnis yang sementara bertumbuh (*ethnic and demographic awareness*) tiba bersamaan dengan dua kemungkinan bagi masyarakat Indonesia yang plural. *Pertama*, efisiensi dan penambahan makna pembangunan bagi masyarakat di setiap daerah sebagai bagian dari memaksimalkan kebijakan otonomi daerah; sebab pembangunan dibawa dekat kepada masyarakat dibandingkan dengan kondisi sebelum era otonomi daerah. *Kedua*, otonomi daerah salah dimaknai atau ditafsir sebagai kebebasan masyarakat dan pemerintah di daerah; untuk mengisolasi kelompok suku lain yang berbeda dan tidak berasal dari daerah tertentu (*the other*). Politik lokal yang diwarnai oleh nuansa identitas mulai mengancam Persatuan Indonesia, yang dikonstruksikan dengan tujuan 'memprioritaskan putra daerah'. Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan mengakui hak-hak setiap warga negara di bumi Indonesia, konsep kedaerahan dan konsideransi demografis yang sempit, telah ikut mendorong kewajiban menghargai semua warga negara dalam bingkai NKRI ke ranah periferial. Bertolak dari realitas politik identitas ini ditambah dengan berbagai faktor yang mengkristalkan kesadaran etnis Dayak, ikut mengakselerasi konflik di Sambas dan Sanggauledo.

Aspek politik lokal menuju pemekaran wilayah juga menjadi konflik internal antara kelompok Dayak sendiri. Pemekaran daerah seperti Landak dan Bengkahyang dilakukan di atas garis etnis untuk meminimalkan potensi konflik internal yang disebabkan oleh pemekaran wilayah. Menurut Tanasaldy (2007; 478) "Pemerintah menentukan batas wilayah kabupaten baru dengan mengikuti garis-garis etnis. Kecamatan-kecamatan dengan mayoritas penduduk Dayak, yaitu Mandor, Menjalin dan Mempawah Hulu, yang aslinya direncanakan berada di dalam Kabupaten Pontianak, kini dialihkan ke Kabupaten Landak". Kebijakan

pemekaran daerah yang berdasarkan garis etnis agar kelompok suku Dayak dapat memerintah dan memiliki daerah, agar tidak terjadi konflik antaretnis seperti tahun 1997 dan 1999 terbukti berhasil.¹⁸ Kendatipun konflik tahun 1999 telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan material, tetapi “Kebanyakan konflik antara Dayak dan Madura di Kalimantan Barat tidak timbul karena motivasi politis. Meskipun demikian, para elit politik selalu berusaha mencari keuntungan politis, terutama dalam konflik yang berspektrum luas seperti yang terjadi pada tahun 1997 dan 1999” (Tanasaldy, 2007: 472).

Pada tataran lokal, masyarakat lokal (Dayak) mengembangkan politik identitas berdasarkan pengalaman mereka untuk masa waktu yang cukup lama, dengan mengamati berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, sumber daya alam, peranan sosial, dan lain sebagainya. Mengkristalnya perasaan kedaerahan seperti isu etnis dan mengerucutnya sentimen anti kelompok etnis non-Dayak yang dipercayai mengganggu stabilitas “kedayakan”, ikut mendorong terjadinya konflik. Mengembangkan mekanisme pertahanan diri (*self copying mechanism*) juga menjadi hak kelompok etnis Dayak dan kelompok etnis lainnya yang mengalami dan merasakan kerugian atau ancaman. Tidak serta merta, karena mempertahankan diri kelompok suku Dayak tidak memiliki perasaan nasionalisme, atau merusak bangunan NKRI termasuk di dalamnya sila “Persatuan Indonesia”. Konflik yang mengakibatkan ratusan jiwa melayang dari berbagai kelompok Melayu, Madura, Dayak, dan lainnya itu, spontan mendorong kelompok Dayak bangkit mempertahankan eksistensi dan identitasnya. Sikap itu dapat dipahami sebab, sebelum Indonesia merdeka, kelompok etnis Dayak, Melayu dan etnis-etnis lainnya di Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakteristik kultural, hak spasial, pemerintahan, aturan dan wewenang-wewenang lokal mereka.¹⁹ Persatuan Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal

¹⁸Apabila pandangan Tanasaldy ini tepat, maka sejatinya konflik Dayak, Melayu dan Madura perlu dipahami juga dari sisi politik, geografis dan demografi; ketika kelompok suku Dayak ‘membutuhkan pengakuan’ atas hak-hak politik dan kewilayahan mereka.

¹⁹Kesadaran berbangsa dan bernegara hingga kini masih merupakan ‘barang mewah’ bagi warga negara yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia, seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Persatuan Indonesia bagi masyarakat di daerah perbatasan tidak lebih berharga dari pemenuhan kehidupan ekonomi yang sangat memprihatinkan setelah Indonesia merdeka 66 tahun. Ketiadaan transportasi,

Ika diwujudkan bukan tanpa ‘paksaan’, sebagai pilihan terbaik dan terakhir menyatukan beragam kelompok etnis dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan kelompok etnis lainnya ke dalam NKRI.

Dua format pandangan tentang “hak-hak setiap warga negara” antara penduduk lokal (Dayak) dan penduduk ‘pendatang’ (Cina, Madura, Jawa, NTT, dan sebagainya) ke Kalimantan Barat, setidaknya merepresentasi pandangan yang masih hidup di kalangan warga negara Indonesia yang serba mendua. Ambiguitas pandangan terhadap kewarganegaraan beserta hak-haknya mendemonstrasikan keberagaman ide yang bertolak dari beberapa faktor. 1) Masih kuatnya identitas etnis yang tidak selalu dihubungkan dengan Indonesia sebagai identitas bersama. 2) Indonesia bukanlah rumah bersama semua kelompok etnis, tetapi hanya untuk segelintir kelompok etnis saja yang dominan dan hegemonik, dalam berbagai lapangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 3) Dua pandangan itu hendak menjustifikasi konsep dasar “Persatuan Indonesia” bahwa, menjadi warga negara Indonesia tidak simultan melebur dalam satu identitas baru kemudian menghilangkan identitas etnis, budaya dan agama masing-masing kelompok. Identitas dan warga budaya setiap kelompok etnis dipertahankan, untuk memperkaya keindonesian tanpa menghilangkan keenisan setiap kelompok etnis. Berada pada persimpangan jalan penyatuan ide tentang menjadi Indonesia, sekaligus tetap sebagai warga kelompok etnisnya merupakan sebuah upaya dan rekonstruksi, dalam perjalanan membangun Indonesia yang majemuk (band. Anderson, 1983 dan Barth, 1969).

Dalam kaitan dengan hubungan etnis di Kalimantan Barat, berbagai pakar menyebutkan bahwa terdapat tiga tendensi pola hubungan etnis di Kalimantan Barat, khususnya di daerah-daerah konflik setelah terjadi konflik berdarah. *Pertama*, hubungan-hubungan antara warga keturunan Melayu, Cina, Madura dan Dayak berangsur-angsur pulih, sebab adanya kebutuhan akan kehadiran dan peranan kelompok etnis berbeda, yang ikut memberikan kontribusi terhadap roda perekonomian daerah. Sebelum terbangunnya hubungan-hubungan yang bersifat alamiah, berbagai pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah

listrik, fasilitas, sarana dan prasarana berdampak pada kesadaran warga negara Indonesia, dengan mengemukakan pertanyaan “apakah kami adalah warga negara Indonesia”?.

daerah berupaya mengembalikan kondisi sebelum konflik. Mereka mendekati pemerintah daerah Jawa Timur dan pemerintah Kalimantan Barat, khususnya kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat yang warga masyarakatnya terlibat dalam konflik. *Kedua*, masih adanya warga masyarakat Madura yang traumatik dengan konflik yang telah mengambil nyawa keluarga mereka untuk kembali. Mereka takut akan pembalasan dendam dari pihak penduduk lokal (Dayak). *Ketiga*, warga Madura atau warga non-Madura yang mengungsi pasca konflik masuk kembali ke lokasi di mana mereka bermukim sebelumnya walaupun dengan segala risiko, sebab mereka merasa memiliki harta benda seperti rumah, kerabat, tanaman, hewan peliharaan yang tertinggal ketika mereka mengungsi ke Pontianak dan Madura dan Jawa Timur. Perubahan positif apapun saat ini, tetapi konflik etnis ikut menumbuhkan segregasi sosial di antara kelompok etnis yang pernah berkonflik, dan menyimpan perasaan curiga berkelanjutan, khususnya di antara warga masyarakat yang mengalami kehilangan anggota keluarga dan harta benda.

Pelajaran Berharga

Etnisitas bukanlah sebuah identitas tunggal, tetapi merupakan gabungan sejumlah elemen, yang melekat erat dengan konseptualisasi mengenai etnisitas atau etnis itu sendiri. Kekeliruan berpikir dalam melihat dan memahami tentang masalah etnis diduga telah terjadi sejak era pemerintahan presiden Soekarno dan kawan-kawan ketika merampungkan ‘proyek’ Pancasila, yang diduga mempergunakan pendekatan ‘paksaan’. Pendekatan ‘paksaan’ itu bukan tidak disadari, tetapi sangat mereka sadari, bagaimana membangun sebuah negara bangsa (ada yang menyebut tepatnya negara suku-suku). Kegelisahan dan niat untuk menggugat dan mengganggu “Persatuan Indonesia” terjadi dalam perjalanan sejarah Indonesia, ketika terjadi pergolakan politik, baik yang bersifat kedaerahan, termasuk juga konflik etnis yang bernuansa agama.

Mencermati konflik yang terjadi di Indonesia, mulai dari konflik Maluku, konflik Sambas, Sanggauledo, Mataram, Poso, Kupang, dan khususnya Kalimantan Barat, dapat disebutkan bahwa kebijakan pemerintah pun ikut berkontribusi terhadap pola relasi antarkelompok etnis dan konflik antarkelompok etnis itu sendiri. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan dan pemasukan devisa ke kas negara, dengan mengeluarkan undang-undang, ketetapan-ketetapan, dan aturan-aturan di sektor kehutanan dan pertambangan, yang

memacu ketimpangan pendapatan antara penduduk lokal dan penduduk pendatang, dan ikut memicu potensi konflik di antara berbagai kelompok etnis di Kalimantan Barat. Kasus terkini di PT Freeport di Papua antara karyawan dan manajemen yang tentunya melibatkan kebijakan pemerintahan Indonesia menjadi bukti kuat, bagaimana keberpihakan pemerintahan melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional, yang tidak selalu mensejahterakan penduduk lokal seperti kelompok etnis Dayak, Papua dan kelompok etnis atau masyarakat adat lainnya di Indonesia.

Kedudukan dan hak-hak kelompok etnis di Indonesia dengan segala kekayaan budaya, sejarah, nilai dan kearifannya berkaitan dengan dua institusi utama masing-masing kelompok-kelompok etnis dan pemerintah. Politik pembiaraan²⁰ (Haba, 2011) yang muncul pada kelalaian pemerintah sehingga tampak mengadu domba antara kelompok etnis dan kelompok agama, patut dipahami sebagai salah satu faktor penting terjadinya konflik-konflik etnis dan agama di Indonesia, termasuk konflik etnis di Kalimantan Barat, yang berakibat pada merenggangnya relasi sosial sesama warga negara. Pemerintah Pusat seolah-olah mengambil manfaat dari setiap konflik (asumsi-asumsi yang dikonstruksi dari konflik sumber daya alam dan wilayah di berbagai daerah yang sering terjadi), sekaligus membuktikan bagaimana lemahnya pemerintah pusat dan jajarannya terhadap konflik-konflik selama ini di Indonesia. Disadari atau tidak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengadopsi dan memperkenalkan budaya 'adi luhung', dengan mangambilalih dan menerapkan berbagai konsep, serta ideologi kelompok etnis dominan dalam masyarakat Indonesia, ikut memarjinalkan kelompok-kelompok etnis (minoritas). Konflik etnis di Kalimantan Barat, antara lain membuktikan bagaimana manajemen pengelolaan budaya dan konflik di Indonesia dan daerah-daerah belum terbangun serta diimplementasikan dengan tepat dan benar.

²⁰Dua contoh mengenai benturan antara warga masyarakat yang disebabkan oleh faktor agama dan ideologi terjadi secara internal dan eskternal. Penolakan Wali Kota Bogor untuk mengizinkan warga jemaat "GKI Taman Yasmin" Bogor beribadah setiap Minggu, walaupun telah ada Keputusan Mahkamah Agung membuktikan bagaimana pemerintah begitu lemah terhadap tekanan kelompok masyarakat tertentu, dan ketidaktaatan pejabat publik. Konflik antara pengikut Ahmadiyah dan umat Islam yang tidak menghendaki adanya kelompok ini, juga mendemonstrasikan bagaimana lemahnya pemerintah, yang tidak mampu mengatasi benturan antara warga negara.

Penutup

Indonesia adalah negara multietnik, bagaikan sebuah mosaik yang dirajut indah oleh para pendiri bangsa dengan susah payah, dan mesti ditata dengan jujur dan diapresiasi oleh semua warga negara Indonesia. Kehidupan bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk mempertahankan sila “Persatuan Indonesia” menjadi tanggung jawab bersama. Gangguan terhadap hidup bermasyarakat, menghasilkan kondisi disharmoni di antara kelompok etnis, dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti disparitas pendapatan antara penduduk lokal dan penduduk pendatang, perbedaan kebudayaan, kebijakan pembangunan yang menguntungkan kelompok tertentu seperti Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri. Strategi pemerataan pembangunan yang gencar dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru berubah dan kemudian menuai reaksi dan antipati, tatkala kebijakan otonomi daerah diimplementasikan di berbagai daerah.

Lemahnya pemerintah pusat sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto berdampak pada hubungan antara kelompok etnis di Kalimantan Barat. Kontestasi untuk memperoleh posisi sosial dan hak-hak khusus di pemerintahan dan bidang-bidang usaha antara orang lokal dan pendatang, berakibat pada meruncingnya hubungan antaretnis. Bahkan isu etnis yang dihubungkan dengan agama, penguasaan sumber daya alam, dapat berujung pada konflik horizontal. Konflik antara warga Dayak, Melayu dan warga Madura di Provinsi Kalimantan Barat layak dihubungkan dengan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan ketimpangan akses ke sumber kekuasaan ekonomi. Tersumbatnya akses ekonomi dan ke pemerintahan yang dirasakan oleh orang Dayak dapat dihubungkan dengan hancurnya habitat mereka, yakni hutan. Bagi orang Dayak hutan tidak saja sumber kehidupan, tetapi juga merupakan simbol identitas “kedayakan” yang inheren dan tidak terpisahkan. Hutan dan sungai adalah bagian integral bagi budaya orang Dayak, sebab orang Kalimantan umumnya dan orang Dayak khususnya dibangun dan direfleksikan melalui hutan dan sungai.

Mencegah konflik berkelanjutan dan konflik-konflik lain yang disebabkan oleh faktor sumber daya alam, perbedaan kebudayaan, sumber daya manusia, aksesibilitas ke pusat kekuasaan, dan faktor-faktor pemicu lainnya, maka pemerintah bekerjasama dengan segenap lapisan masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan dan politik berkewajiban menjaga benturan antaretnis, seperti yang pernah terjadi di beberapa

daerah termasuk di Kalimantan Barat. Hubungan etnis yang harmonis di antara semua kelompok, baik yang tinggal di wilayah Kalimantan Barat maupun di wilayah Indonesia lainnya, menjadi barometer kesadaran hidup warga negara Indonesia yang perlu diprioritaskan. Kebijakan pembangunan yang berkeadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, merupakan pilihan kebijakan nasional di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Barth, Fredrik, 1969. "Introduction". In Fredrik Barth (ed). *Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference*. Pp. 1-38. Boston, MA: Little Brown.
- Bossevain, Jeremy and Clyde, Mitchel, J. 1972. *Network Analysis Studies in Human Interaction*. Paris-The Hague: Mouton.
- Cahyono, Heru-Asvi Warman Adam, dkk. 2006. *Negara dan Masyarakat Dalam Resolusi Konflik di Indonesia (Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Djuweng, Stepanus. 1999. "Pembangunan dan Marginalisasi Masyarakat Adat Dayak: Suara Dari Kalimantan". *Menuju Masyarakat Terbuka. Lacak Jejak Pembaruan Sosial di Indonesia* (editor Muhammad Hidayat Rahz), hlm. 171-200. Yogyakarta: Ashoka Indonesia-Insist.
- Haba, John. 2005. "Hubungan Etnis: Jagoi Babang – Entikong. *Dari Entikong Sampai Nunukan. Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan, Malaysia Timur, Sarawak – Sabah*, hlm. 83-108. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____, 2010. *Etnisitas, Identitas dan Nasionalisme di Wilayah Perbatasan Indonesia* (Naskah Pidato Pengukuhan Profesor Riset). Jakarta: LIPI Press.
- _____, 2011. *Hak Beribadah Warga Negara. Studi Kasus di Kota Bogor*. Jakarta: Litkom PGI.

- Habermas, Jurgen. 1981. "Modernity versus Postmodernity". *New German Critique* (22): 3-12.
- Ju Lan, Thung. 2003. "Program Manajemen dan Transformasi Konflik". Dalam *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Kriesberg, Louis. 1982. *Social Conflict*, 2nd edition. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, Inc.
- Kymlicka, Will. 2003. *Kewarganegaraan Multikultural. Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Minoritas* (terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Rogers, Everret, M. 1983. *Diffusion and Innovation*. New York: Free Press.
- Tanasaldy, Taufiq. 2007. "Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat". *Politik Lokal di Indonesia* (editor: Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken) dibantu oleh Ireen Karang-Hooggenboom, hlm. 461-490. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2010. *Mencari Indonesia (2). Batas-Batas Rekayasa Sosial*. Jakarta: LIPI Press.

